

PERBANDINGAN PEREKONOMIAN DARI MASA SOEKARNO HINGGA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (1945 - 2009)

Abdul Hakim
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
E-mail: abdul.hakim.uui@gmail.com

Guswildan Giovani
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
E-mail: wildant_86@yahoo.com

Abstract

This research to analyzes Indonesia's economy in various presidency, that since Indonesia's independence in 1945 until 2009. This study used qualitative research methods-historical, and found that each leadership has their stated objectives. In Suharto, began development with a clearer direction. But the factor of corruption, collusion and nepotism makes the New Order fall. Habibie did re-alignment in the economic, social and political. Gus Dur emphasizes building relationships with foreign countries in order to build the national economy. Megawati succeeded in lowering inflation and interest rates, and increase economic growth and menguatlan rupiah. Susilo Bambang Yudhoyono succeeded in improving the economy in general, inflation mengendaikan, growing domestic aggregate demand, and reduce imports.

Keywords: *president, qualitative-historical development, the focus of policy*

Abstrak

Penelitian ini untuk menganalisis perekonomian Indonesia dalam berbagai kepresidenan, bahwa sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-sejarah, dan menemukan bahwa setiap kepemimpinan memiliki tujuan yang telah ditetapkan mereka. Dalam Soeharto, mulai pembangunan dengan arah yang lebih jelas. Tapi faktor korupsi, kolusi dan nepotisme membuat Orde Baru jatuh. Habibie melakukan re-alignment di bidang ekonomi, sosial dan politik. Gus Dur menekankan membangun hubungan dengan negara-negara asing dalam rangka membangun perekonomian nasional. Megawati berhasil menurunkan inflasi dan suku bunga, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menguatlan rupiah. Susilo Bambang Yudhoyono berhasil meningkatkan perekonomian secara umum, mengendaikan inflasi, meningkatnya permintaan agregat domestik, dan mengurangi impor.

Kata kunci: *Presiden, perkembangan kualitatif-historis, fokus kebijakan*

Ketika Belanda menjajah Indonesia (Hindia-Belanda), pemerintahan dikonsolidasikan di Jawa. VOC membangun markas besarnya di Jakarta (Batavia) pada tahun 1619, dengan pertimbangan utama berupa letak yang strategis yang berpengaruh pada nilai ekonomi perdagangan Jawa pada saat itu. Pada waktu itu, Jakarta merupakan kantong di kaki hutan kecil tanpa pendalaman produktif. Perekonomian terus berkembang ketika Belanda mulai menduduki Hindia Belanda (Lindblad, 2002, 33).

Menurut sensus kolonial pada tahun 1930, jumlah penduduk saat itu adalah 60 juta jiwa, menyerupai jumlah penduduk negara-negara Perancis, Jerman atau Inggris. Pertumbuhan penduduk tiga negara tersebut mencapai puncaknya sekitar abad XIX dan mulai menurun sejak saat itu. Pertumbuhan penduduk Indonesia baru berkembang saat itu. Lima tahun pasca kemerdekaan, jumlah penduduk Indonesia mencapai 83 juta jiwa dan terus meningkat (lihat Keyfitz dalam Sjahrir, 1991, 456-457).

Ekonomi Indonesia tumbuh dengan cepat sejak akhir dekade 1980. Pasca resesi di awal sampai pertengahan tahun 1980, pertumbuhan ekonomi hanya 2,5% per tahun. Namun ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 5% setelah 1987 sampai tahun 1994 (Tjiptohrijanto, 1997, 21).

Setelah memperoleh kemerdekaannya, berbagai sistem menyangkut ketatanegaraan mulai disusun. Sisa-sisa pembangunan semasa penjajahan mulai dipergunakan, mulai dari bangunan fisik hingga ilmu pengetahuan, termasuk bidang ekonomi. Perbedaan pemikiran pada setiap presiden yang memimpin Indonesia telah menimbulkan perbedaan penerapan kebijakan yang dijalankan sehingga menimbulkan dampak yang beranekaragam. Beberapa krisis ekonomi yang pernah menimpa In-

donesia yang bersumber dari luar dan dalam negeri juga menimbulkan pengaruh beragam dalam pasar ekonomi dan tugas presiden sebagai pemimpin tertinggi juga mempunyai andil untuk mampu mempertahankan kondisi dalam negeri dan mempertahankan kondisi perekonomian agar tidak goyah.

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan maksud untuk menarik pelajaran penting dari setiap masa pemerintahan, paper ini membandingkan perekonomian pada masa presiden Soekarno hingga presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni dari tahun 1945 sampai tahun 2009. Dua isu utama yang akan dianalisis adalah kelebihan setiap presiden dalam bidang ekonomi dan kekurangan setiap presiden dalam bidang ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi perbandingan dimana peneliti memeriksa dua (atau lebih) kasus, spesimen atau peristiwa, dalam berbagai macam bentuk. Dari perbandingan obyek tersebut, kemudian diambil dan diputuskan yang paling menarik untuk diteliti. Sifat dan informasi yang terdapat dalam data harus dicatat sebagai rekaman untuk setiap kasus. Perbandingan tersebut kemudian dianalisis oleh peneliti. Tujuan akhir dari penelitian dengan metode ini adalah untuk mengungkapkan ketidak-samaan struktur secara sistematis. Ketidak-samaan atau ketidak-benaran dari kasus tersebut kemudian diteliti.

Dalam penelitian ini beberapa parameter dijadikan acuan perbandingan, yakni pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, inflasi, dan tingkat kemiskinan. Teori mengenai pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh banyak ahli ekonomi. Lima teori

utama adalah teori pertumbuhan Adam Smith (1776), Harrod-Dommar (1947), Solow-Swan (1956), Thomas Robert Malthus (1798), dan teori lima tahapan pembangunan oleh Walter Rostow (1960).

Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi subyek (informan) penelitian, alat pengumpul data, dan teknik analisis data. Penulis menerapkan metode historis dan memfokuskan dalam bidang ekonomi. Penelitian ini mencakup kegiatan perekonomian pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno hingga masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dua isu yang diselidiki adalah isu sejarah dan isu ekonomi. Isu sejarah dapat dilihat dari cakupan tahun penelitian mulai tahun 1945 hingga 2009 dan peristiwa yang masuk dalam tahun tersebut lebih terfokus pada bidang ekonomi secara makro dan dampak yang timbulkan dari kebijakan presiden yang memimpin.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang menitikberatkan pada deskripsi yang komprehensif, klasifikasi data dan keterkaitan antar konsep (Moleong, 2005, 289). Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data utama penelitian ini adalah Buku statistik Indonesia (*statistical year book of Indonesia*), BPS, statistik perdagangan luar negeri Indonesia, dan *Internasional Financial Statistic*. Riset kepustakaan di Indonesia dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan data pertumbuhan penduduk, sejarah ekonomi Indonesia, perkembangan politik Indonesia, dan biografi presiden Indonesia.

Penelitian ini menggabungkan penelitian historis kualitatif. Metode historis terletak pada perentangan penelitian sejak tahun 1945 sampai tahun 2009. Metode kualitatif dicerminkan dari diskusi perma-

salahan bidang ekonomi yang menggunakan fakta sejarah, tanpa maksud melakukan generalisasi (inferensi) untuk kasus-kasus di negar lain, serta tidak berusaha untuk menguji hipotesis (Idrus, 2007, 35). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara mendalam tentang situasi, atau proses yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian literatur atau studi pustaka sehingga sumber-sumber yang dikumpulkan bersifat tertulis. Penulis mengumpulkan sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, dan merujuk pada sumber-sumber lain seperti penelusuran online di internet, artikel maupun bahan-bahan tertulis lainnya. Sumber referensi lain dalam penelitian ini adalah jurnal yang diterbitkan secara berkala. Melalui metode dokumenter, data yang diperoleh tidak terbatas dalam ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dokumen. Dalam arti luas termasuk monumen, artefak, foto, *tape*, *flash disk* dan sebagainya (Bungin, 2007, 122). Pada tahapan ini, penulis melakukan observasi di beberapa perpustakaan di Yogyakarta dan Jakarta antara lain: UPT Perpustakaan UNY, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan FE UII dan Perpustakaan Kolose Ignatius.

Sumber-sumber yang digunakan oleh penulis sebagian besar adalah buku-buku yang telah tersedia di perpustakaan dan toko buku wilayah Yogyakarta dan Jakarta. Banyaknya buku yang tersedia menimbulkan variasi penulisan, penggunaan bahasa asing dalam buku dan penetapan angka tahun sebuah peristiwa. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk bersikap intersubjektif terhadap buku-buku yang akan dijadikan acuan dalam penulisan skripsi dengan

berdasarkan pada pengumpulan data-data yang terjadi saat peristiwa.

Interpretasi merupakan penafsiran yang dilakukan penulis dalam menetapkan makna yang saling berhubungan dari faktor-faktor ekonomi dan sejarah. Dalam tahap ini penulis mencari dan menetapkan makna yang diperoleh setelah ditetapkan kritik ekstern dan intern. Berdasarkan makna dari kritik ekstern dan intern, kemudian dirangkai menjadi sebuah bentuk yang dapat disampaikan dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Penulisan merupakan pendekatan dalam metodologi sejarah, sebagai suatu penulisan sejarah yang sebenarnya, dan sebagai interpretasi dari kejadian-kejadian sejarah. Penulisan adalah dari hasil penelitian yang memaparkan tentang teori dan aplikasinya dilapangan. Penulisan dalam karya ilmiah dimaksudkan agar penulis mengkonstruksi sebuah pengetahuan melalui cara-cara berfikir deduktif-induktif dan induktif-deduktif. Penulis dapat berspekulasi secara ilmiah dengan menjelaskan asumsi-asumsi dasarnya. Bahkan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pikiran-pikirannya, gagasan-gagasan yang menurutnya benar apa yang diyakininya, alami selama menulis atau pengamatan dan berdasarkan atas teori yang dipelajari (Bungin, 2007, 263).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan Indonesia hingga saat ini tidak terlepas dari sejarah Indonesia pada masa kerajaan dan masa penjajahan. Perekonomian di nusantara pada masa kerajaan tertua, yakni Kutai, masih bersifat tradisional dan bersifat domestik. Pada abad ke-7 perekonomian semakin meluas saat dua kerajaan besar yaitu kerajaan Sriwijaya mempunyai wilayah strategis di kawasan

selat Malaka dan kerajaan Majapahit yang memiliki kekuasaan sebagian besar wilayah nusantara dan Semenanjung Malaya (sekarang Malaysia). Semenanjung Melayu dan Filipina bagian selatan masuk dalam daerah pengaruh kekuasaan kerajaan Majapahit, yaitu dalam bentuk pemerintahan konfederasi dengan Majapahit sebagai pusat pemerintahannya (Salam, 1984).

Tahun 1511, ketika masa kerajaan masih berjalan, Spanyol dan Portugis masuk ke nusantara melalui wilayah Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku. Memasuki tahun 1602, Belanda ke nusantara melalui jalur perdagangan di bawah *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). VOC adalah Perserikatan perusahaan dari Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas di Asia. Kewenangan VOC di Hindia Belanda memiliki peran yang kuat, yakni memelihara angkatan perang, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar Negeri Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan/mengeluarkan mata-uang sendiri, dan memungut pajak. Kewenangan tersebut mendapat penentangan dari masyarakat lokal di Hindia Belanda sehingga terjadi berbagai perlawanan di seluruh wilayah yang diduduki oleh VOC (http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia).

Selama pendudukan Belanda di Hindia Belanda, terjadi perkembangan ekonomi dalam hal perdagangan. Kolonial Belanda membawa mesin pengolahan untuk mengambil hasil bumi di Indonesia. Salah satu hasil bumi yang dihasilkan saat pendudukan Belanda adalah gula. Saat itu, gula adalah komoditi penting dan Hindia Belanda menjadi produsen terbesarnya (Majalah Kereta Api. Edisi 49. Agustus 2010, 7).

Pendudukan Belanda di Indonesia terjadi dalam kurun waktu sekitar 350 tahun. Setelah Belanda mundur, Indonesia diduduki oleh Jepang selama tiga tahun. Pasca kemerdekaan Indonesia mulai membangun ketatanegaraan dimulai dari pemilihan pemimpin dan struktur pemerintahannya. Pembinaan diitikberatkan pada sektor pemerintahan, sehingga sektor perekonomian terabaikan dan mengalami Inflasi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Selama ini kita kenal bahwa Indonesia hingga saat ini baru dipimpin oleh enam presiden, yaitu Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun menurut catatan sejarah, hingga hingga saat ini sebenarnya Indonesia sudah dipimpin oleh delapan presiden. Dua tokoh yang terlewat itu adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat.

Sjafruddin Prawiranegara adalah Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika Presiden Soekarno dan wakilnya Hatta ditangkap Belanda pada awal agresi militer kedua, sedangkan Mr. Assaat adalah Presiden RI saat republik ini menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (1949). Namun, mengingat pendeknya masa kepresidenan Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat, dan juga kurangnya informasi yang tersedia tentang masa dua pemimpin tersebut, dalam paper ini hanya akan dibahas masa dari enam kepresidenan yang lain, tanpa bermaksud menghilangkan pengakuan bahwa Sjafrudin

dan Assaat pernah menjadi kepala negara Indonesia (lihat Arifin, 2010).

Pembahasan berikut ini akan diuraikan masa kepemimpinan presiden di Indonesia. *Pertama, Kepemimpinan Soekarno (1945-1967)*. Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum dapat melaksanakan pembangunan ekonomi secara utuh karena sedang mempertahankan kemerdekaan hingga tahun 1949. Pada tahun berikutnya, Indonesia menitikberatkan pada pembangunan politik karena situasi politik di Indonesia belum stabil. Baru pada tahun 1950 Indonesia mulai bisa melaksanakan pembangunan ekonomi (Rifai, 2009, 24).

Masa kepemimpinan Soekarno merupakan masa perbaikan pasca penjajahan. Laju pertumbuhan jumlah penduduk pasca kemerdekaan sangat tinggi. Jumlah penduduk pada tahun 1950 adalah 77,2 juta jiwa, meningkat menjadi 85,4 juta jiwa pada tahun 1955, dan 97,02 juta jiwa (sensus penduduk tahun 1961). Produksi pangan mengalami kenaikan, namun belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk. Produksi beras pada tahun 1956 adalah 26% lebih tinggi dari produksi pada tahun 1950, tetapi impor beras masih diperlukan. Perusahaan-perusahaan asing pada tahun 1950-an mulai masuk ke Indonesia seperti Shell, Stanvac, dan Caltec, dan mendapatkan posisi yang kuat di bidang industri minyak. Sebagian besar pelayaran antar pulau dipegang oleh pelayaran KPM Belanda (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*). Perbankan didominasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda, Inggris, dan Cina. Orang-orang Cina menguasai sebagian besar kredit pedesaan (Rickles, 1991, 356-358).

Pada tahun 1949 menteri Keuangan Sjafrudin Prawiranegara melakukan “Gun-

ting Sjafrudin” atau *shanerring* yang bertujuan menghapus inflasi. Rakyat diwajibkan menggunakan uang pecahan lima rupiah ke atas dan dipotong menjadi dua potong, dengan ketentuan sebelah kanan masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah tetapi nilainya tinggal setengah, sedangkan sebelah kiri harus diserahkan kepada pemerintah untuk diganti oleh obligasi negara yaitu tanda hutang negara (Soebagyo, 1980, 70).

Dalam rangka mengendalikan inflasi, pada tanggal 25 Agustus 1959 mata uang Rupiah didevaluasikan sebesar 75%. Dari sisi moneter, semua nilai uang kertas Rp500,00 dan Rp1.000,00 diturunkan menjadi sepersepuluh dari nilai nominalnya, dan deposito-deposito bank dalam jumlah besar juga dibekukan. Tindakan ini mengurangi jumlah uang beredar dari Rp 34 Milyar menjadi Rp 21 Milyar. Krisis likuiditas menjadikan pemerintah terpaksa memperbolehkan utang dan dalam waktu enam bulan persediaan uang telah kembali ke tingkat sebelumnya dan inflasi kembali stabil (Rickles, 1991, 404). Inflasi sangat tinggi telah menyebabkan harga barang-barang naik 500% selama tahun 1965. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebabkan oleh harga beras yang naik sebesar 900% setiap tahun. Kurs pasar gelap untuk Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat jatuh dari Rp 5.100,00 pada awal tahun 1965 menjadi Rp 17.500,00 pada kuartal ketiga dan menjadi Rp 50.000,00 pada kuartal keempat (Rickles, 1991, 426).

Pada masa Soekarno, pada tahun 1963, Indonesia berhasil memenangkan kembali Irian Barat. Bung Karno menciptakan musuh baru, yakni Malaysia, untuk memelihara koalisi semu segitiga antara dirinya dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan PKI (Partai Komunis Indone-

sia). Koalisi ini pecah dengan adanya pembunuhan, kudeta dan kontra kudeta pada 1 Oktober 1965.

Inflasi dan korupsi menjadi masalah utama dalam kepemimpinan Soekarno. Inflasi menjadi kronis dan tidak terkendali dan tidak terawasi sejak awal kemerdekaan. Jumlah Uang beredar menjadi dua kali lebih besar pada tahun 1965. Harga-harga meningkat antara 30-50% perbulan. Presiden dan kabinetnya serta angkatan bersenjata pada saat itu menutupi kebutuhan mereka sendiri karena tidak dapat mengharap alokasi anggaran, tanpa adanya anggaran belanja dan pengawasan anggaran yang efektif. Selain itu pasar gelap, penyelundupan dan bentuk-bentuk penyimpanan lainnya telah mengurangi pengawasan ekonomi pemerintah pada tingkat yang sangat kronis. Sebagian besar sektor ekonomi produksinya merosot seperti beras, makanan pokok dan bahan makanan lainnya. Meskipun tidak mutlak menurun, namun telah gagal mengimbangi pertumbuhan penduduk, sehingga pada tahun 1966, 10% kebutuhan pangan harus diimpor (Arndt, 1991, 245). Pemerintahan di masa Soekarno, 1945 - 1966, berganti kabinet sebanyak 28 kali, Soekarno berakhir pada 12 Maret 1967.

Kedua, Kepemimpinan Soeharto (1967-1998). Soeharto mulai menjalankan tugasnya sebagai presiden Indonesia ke-2 pada 12 Maret 1967, dinamakan masa Orde Baru. Pada tahun 1967, Indonesia berada dalam situasi yang kacau. Pendapatan per kapita turun sampai tingkat di bawah yang telah dicapai lima tahun sebelumnya, perekonomian hancur oleh hiper-inflasi, sektor pertanian tidak dapat lagi menyediakan bahan pangan yang cukup untuk kebutuhan dalam negeri dan kemiskinan menjadi nasib sebagian besar penduduk.

Walaupun pemerintah Orde Baru bergerak cepat dan pasti untuk membangun sejumlah tujuan di bidang ekonomi, sampai tahun 1985 industrialisasi hanya berpengaruh kecil di Indonesia. Sektor pertanian menyumbang sekitar 24% dari PDB, sementara industri non migas menyumbang kurang dari 14% (Abimanyu (Ed.), 2010, 24-25).

Pada masa Soeharto banyak berdiri organisasi pengusaha seperti KADIN (Kamar Dagang dan Industri), Hippi (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), HIPLI (Himpunan Pengusaha Lemah Indonesia), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), APEGTI (Asosiasi Pengecer Gula dan Terigu Indonesia), REI (Real Estate Indonesia) dan ASI (Asosiasi Semen Indonesia), yang dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi anggota dan *bargaining power*-nya. Pendirian HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan sejenisnya mempunyai tujuan yang sama. Dalam perekonomian internasional, Indonesia masuk dalam OPEC (*Organisation of Petroleum Exporting Countries*) dan kerja sama regional APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*) (Kuntowijoyo, 1995, 129-130).

Pada saat Ali Wardhana menjabat menteri keuangan, Amerika Serikat pada 15 Agustus 1971 menghentikan pertukaran dollar dengan emas. Presiden Nixon cemas dengan terkurasnya cadangan emas AS jika dollar dibolehkan terus ditukar emas, sedang nilai waktu itu USD 34.00 sudah bisa membeli 1 ons emas. Soeharto tidak dapat mengelak dari dampak gebrakan Nixon dan Indonesia menvaluasi Rupiah pada 21 Agustus 1971 dari Rp 378 menjadi Rp 415 per 1 USD. Walaupun Indonesia mendapat keuntungan dengan kenaikan

harga minyak akibat Perang Arab - Israel 1973, tetapi Pertamina justru hampir mengalami kebangkrutan dengan utang USD 10 milyar. Devaluasi kedua pada masa pemerintahan Soeharto, yakni pada 15 November 1978, dari Rp 415 menjadi Rp 625 per 1 USD tidak dapat dihindari.

Pada saat Radius Prawiro menjabat Menteri Keuangan, dia menvaluasi rupiah sebesar 48% (hampir sama dengan proses menggunting separuh nilai dari Rupiah). Kurs 1 dolar AS naik dari Rp 702,50 menjadi Rp 970. Pada 12 September 1986 dia kembali menvaluasi rupiah sebesar 47%, dari Rp 1.134 ke Rp 1.664 per 1 dolar AS. Walaupun Soeharto selalu berpidato bahwa tidak ada devaluasi, tapi sepanjang pemerintahannya telah terjadi empat kali devaluasi (<http://id.wikipedia.org/wiki/Devaluasi>). Kemantapan struktur ekonomi nasional terlihat pada peningkatan dan perluasan jaringan pelayanan prasarana dasar seperti jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi dan yang lainnya (Odang, 1996, 16-17).

Pada pertengahan 1990-an, manufaktur berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama lebih dari satu dekade, dengan menyumbangkan hampir sepertiga dari kenaikan PDB dari tahun 1983 sampai 1995 (Emmerson (Ed), 2001, 195).

Orde Baru yang dibangun oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1966 telah menghasilkan prestasi yang luar biasa. Pada tahun 1996 atau 30 tahun kemudian sebagai hasil pembangunan, Indonesia mengalami dua kali *Quantum Leap*, dari negara miskin ke negara berkembang, dan dari negara berkembang menjadi negara berpendapatan menengah. Pada tahun 1966 tingkat kemiskinan diperkirakan lebih dari 50%, sementara pada tahun 1996 kurang dari 15%.

Inflasi sekitar 400% pada tahun 1966, sementara tahun 1996 kurang dari 10%. Bahkan, pendapatan per kapita melonjak dari USD200 pada tahun 1966 menjadi USD1.200 pada tahun 1996. Selama 25 tahun terakhir sebelum krisis 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak di kisaran 6%-8% per tahun (Abimanyu (Ed), 2010, 581-582).

Kebijakan fiskal tahun 1998 sampai 1999 pada awalnya diarahkan untuk berperan sebagai suatu kebijakan campuran (*policy mix*) dalam rangka membantu pengendalian laju inflasi dan nilai tukar rupiah di sektor moneter. Hal ini ditunjukkan oleh kehati-hatian pemerintah dalam menetapkan sasaran defisit APBN yang disusun pada tanggal 23 Januari 1998, yaitu hanya 1-2% dari PDB. Dalam perkembangannya, kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi dan dampaknya terhadap masyarakat yang semakin luas telah memaksa pemerintah untuk mengubah asumsi yang digunakan dalam penyusunan anggaran, sekaligus mengubah orientasi kebijakan fiskal. Orientasi kebijakan fiskal kemudian difokuskan pada upaya peningkatan peranan pemerintah sebagai penggerak roda perekonomian, menggantikan peranan sektor swasta yang sedang terpuruk serta mengurangi tingkat pengangguran, sekaligus beban masyarakat miskin. Perubahan orientasi tersebut tercermin dari peningkatan sasaran defisit APBN menjadi 8,5% dari PDB, jauh lebih ekspansif daripada sasaran semula. Perubahan yang besar terjadi pada alokasi pengeluaran sosial, yakni menjadi sekitar 29% dari total anggaran, meliputi pengeluaran subsidi dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) masing-masing sebesar 6,2 dan 1,9% dari PDB (Bank Indonesia, 1999).

Presiden Soeharto akhirnya mundur pada 21 Mei 1998 saat terjadi gejolak so-

sial, politik dan ekonomi di Indonesia. Walaupun penggantian presiden sudah dilakukan, Indonesia masih terpuruk dalam kemiskinan yang semakin meluas disertai ketegangan etnis daerah.

Ketiga, Masa Presiden B. J. Habibie. Pengangkatan B.J Habibie menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 diwarnai dengan suasana politik dan ekonomi yang kacau. B.J Habibie merupakan seorang ilmuwan tingkat internasional. Selama 17 bulan masa pemerintahannya sebagai Presiden Indonesia ketiga, Habibie memperkenalkan reformasi pasca Soeharto. Ketika Habibie mulai memegang kekuasaan pada tanggal 21 Mei 1998, terdapat lima isu terbesar yang harus dihadapi yaitu, masa depan reformasi, masa depan ABRI (sekarang TNI), masa depan daerah yang melepaskan diri dari Indonesia, masa depan Soeharto (Keluarga, kekayaan dan kroni-kroninya) dan masa depan perekonomian serta kesejahteraan rakyat (Rickles, 2008). Kabinet Presiden Habibie dibentuk dalam waktu 24 jam, dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan.

Sebelum krisis ekonomi 1997/1998, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang amat pesat. Selama lima Repeleta yang pertama di bawah pemerintahan Soeharto, dari 1969 sampai 1994, PDB meningkat rata-rata 6,8% setahun. Pertumbuhan penduduk rata-rata 2% setahun (Emmerson (Ed), 2001, 192).

Pertengahan 1998, inflasi ditargetkan mencapai angka 80% untuk tahun berjalan, namun akhirnya target tersebut tidak tercapai. Peristiwa Badai El nino menjadikan panen beras berkurang. Nilai tukar rupiah berada di bawah Rp 10.000,00 per dollar, bahkan mencapai level Rp 15.000,00 - Rp 17.000,00 dan diperkirakan 113 juta orang Indonesia (56% dari

jumlah penduduk) berada di bawah garis kemiskinan. Pada akhir Juni 1998, anggaran negara harus direvisi untuk ketiga kalinya karena asumsi-asumsinya tidak relevan. IMF memprediksi bahwa perekonomian akan menurun sebanyak 10%. B.J. Habibie mundur dari kekuasaan pada 20 Oktober 1999, digantikan oleh Abdurrahman Wahid.

Keempat, Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1999-2001). Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimulai pada 20 Oktober 1999. Gus Dur memiliki intelegensia, kecocakan, keterbukaan dan komitmen terhadap pluralisme serta kebencian terhadap dogmatisme (Rickles, 2008, 655).

Pada tahun 2000 beberapa indikator menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi nampak menguat. Pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari yang diperkirakan, yakni menjadi 4,8%. Beberapa faktor seperti membaiknya permintaan domestik, masih kompetitifnya nilai tukar rupiah, serta situasi ekonomi dunia yang membaik, telah memungkinkan sejumlah sektor ekonomi, termasuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM), meningkatkan kegiatan usaha mereka, baik untuk memenuhi konsumsi domestik maupun ekspor. Beberapa kemajuan juga dicapai, misalnya dalam proses restrukturisasi perbankan, penjadwalan kembali utang luar negeri pemerintah, serta penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh nilai tukar yang kompetitif dan ekspor non migas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan investasi semakin meningkat.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tingkat pengeluaran konsumsi juga ikut mengalami peningkatan. Ekspor, investasi, dan konsumsi terhadap

pertumbuhan PDB pada tahun 2000 masing-masing mencapai 3,9%, 3,6%, dan 3,1%. Kuatnya kinerja ekspor dan peran investasi yang meningkat dalam pembentukan PDB mengindikasikan semakin mantapnya proses pemulihan ekonomi yang terjadi. Di sisi penawaran, semua sektor dalam perekonomian mengalami pertumbuhan. Dengan dorongan permintaan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor pengangkutan menjadi motor pertumbuhan dengan sumbangan terhadap pertumbuhan PDB masing-masing sebesar 1,6%, 0,9%, dan 0,7%. Sektor industri pengolahan pada tahun 2000 mencatat pertumbuhan sebesar 6,2%, sementara sektor perdagangan serta sektor pengangkutan masing-masing meningkat sebesar 5,7% dan 9,4% (Bank Indonesia 2000).

Tekanan kenaikan harga menjadi lebih besar dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi berbagai subsidi guna mendorong pembentukan harga berdasarkan mekanisme pasar serta kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS). Dalam tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyesuaian di bidang harga dan pendapatan yang antara lain mencakup pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif dasar listrik (TDL), tarif angkutan, cukai rokok, serta kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri, serta upah minimum regional (UMR). Selain itu, tekanan inflasi juga muncul dengan semakin tingginya ekspektasi peningkatan laju inflasi di kalangan konsumen dan produsen. Peningkatan ekspektasi ini mengakibatkan kecenderungan kenaikan harga-harga menjadi sulit diredam dengan segera karena cenderung bersifat menetap (*persistent*). Secara

keseluruhan, laju inflasi tahun 2000 mencapai 9,35% (*year-on-year*), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 1999 sebesar 2,01% (Bank Indonesia, 2000).

Kegigihan mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun, keterbatasan dalam pengelihatian pada panca indra, masalah kesehatan, kurangnya pengalaman dalam masalah pemerintahan, membuat Gus Dur diberhentikan sebagai Presiden pada tanggal 23 Juli oleh MPR (Rickles, 2008, 655).

Kelima, Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri (2001-2004). Kepemimpinan Presiden Megawati dimulai pada 23 Juli 2001. Program pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah privatisasi BUMN, pengelolaan hutang luar negeri, restrukturisasi keuangan, dan usaha kecil menengah (Muchtart, 2002, 118-119).

Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi indeks harga konsumen (IHK) di luar dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan sebesar 4%– 6%. Sementara itu, dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan diperkirakan dapat menimbulkan tambahan inflasi sebesar 2% – 2,5% di atas sasaran tersebut. Secara keseluruhan, tekanan inflasi pada 2001 diperkirakan berasal dari dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan, meningkatnya sisi permintaan agregat, dan ekspektasi inflasi masyarakat yang terkait dengan dampak kebijakan pemerintah tersebut (Bank Indonesia 2001).

Memasuki tahun 2002, perekonomian tumbuh 3,7%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih belum didukung oleh struktur yang seimbang. Perekonomian masih bertumpu pada konsumsi sementara investasi dan ekspor masih belum menunjukkan perkembangan yang

menggembirakan. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat dari 4,4% menjadi 4,7% pada tahun laporan, sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 12,8% pada 2002, jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 9% (Bank Indonesia, 2002).

Selama 2003, perekonomian Indonesia menghadapi beberapa tantangan, terkait dengan dampak tragedi bom di Bali tahun 2002, rencana untuk keluar dari program *International Monetary Fund* (IMF) pada akhir 2003, dan kondisi perekonomian dunia yang masih lesu. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia telah mengambil serangkaian kebijakan untuk mendorong proses pemulihan ekonomi dan juga tetap menjaga kestabilan ekonomi makro. Dalam perkembangannya, berbagai langkah kebijakan tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung tercapainya kondisi ekonomi makro yang stabil dan cenderung membaik selama 2003. Kondisi ini antara lain terlihat pada nilai tukar rupiah yang menguat dan laju inflasi yang menurun, baik dibandingkan dengan proyeksi di awal 2003 maupun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yang mengindikasikan bahwa proses pemulihan ekonomi terus berlangsung.

Pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada konsumsi sementara kegiatan investasi dan ekspor tumbuh pada tingkat yang masih rendah. Kondisi ini diperberat oleh belum adanya strategi kebijakan yang terpadu untuk mewujudkan sektor industri yang kuat dan berdaya saing tinggi sehingga pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai sektor yang memiliki pangsa terbesar dalam pembentukan PDB masih sangat rendah dibandingkan periode se-

belum krisis. Kondisi demikian mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih belum cukup untuk menyerap tambahan angkatan kerja dan belum mampu mengangkat pendapatan per kapita kembali ke level sebelum krisis (Bank Indonesia, 2003).

Pada tahun 2004, kestabilan ekonomi makro tetap terjaga, kepercayaan internasional semakin meningkat, agenda ekonomi didefinisikan dengan jelas, dan kemampuan kelembagaan meningkat terutama dalam mekanisme perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pada tataran birokrasi dan politik, yang akan menjadi basis bagi akselerasi pertumbuhan di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2004 merupakan sebuah fase baru dalam pengelolaan ekonomi bangsa karena sejak awal 2004 Indonesia menjadi negara terakhir di antara negara-negara terkena krisis di Asia yang telah menyelesaikan program stabilisasi ekonomi makro di bawah pengawasan IMF. Keputusan untuk melepaskan diri dari program tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi makro yang semakin membaik serta komitmen yang kuat untuk melanjutkan program restrukturisasi ekonomi secara mandiri. (Bank Indonesia 2003). Masa jabatan Presiden Megawati berakhir pada 20 Oktober 2004 dan digantikan oleh Presiden berikutnya melalui Pemilu.

Keenam, Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009). Presiden Indonesia ke-6 ini dipilih oleh rakyat pada pemilu 2004 dengan masa jabatan yang dimulai 20 Oktober 2004. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah pimpinan Partai Demokrat. Pandangan ekonomi nasional menurut Partai Demokrat yang mengajukan konsep ekonomi kebangsaan memiliki ciri: (a) mementingkan kepentingan nasional dan (b) terbuka terhadap ekonomi

lain dan globalisasi, yang lebih lanjut bercirikan tidak mengejar pertumbuhan tetapi pertumbuhan yang lebih merata, lebih bersandar pada kekuatan nasional, dan mengakui adanya plurarisme (Setiawan dan Nainggolan, 2004, 179).

Partai Demokrat berpendapat bahwa desentralisasi fiskal harus diperluas. Daerah harus mendapat bagian dari PPh dan PPN sehingga daerah terdorong untuk berinisiatif menarik investasi. Investasi di daerah tanpa desentralisasi PPh hanya mendatangkan keuntungan finansial yang tidak seberapa bagi daerah yang bersangkutan. Keuntungan PPh badan tidak jatuh ke Pusat (Setiawan dan Nainggolan, 2004, 180-181). Partai Demokrat memberikan perhatian yang lebih besar dan sistematis kepada UKM, Koperasi, sistem Bank Syariah, pemanfaatan sumberdaya alam nasional, distribusi kekayaan nasional, kesejahteraan tenaga kerja dan semua hal yang menyangkut bahan-bahan pertumbuhan ekonomi (Setiawan dan Nainggolan, 2004, 180-181).

Pergerakan ekonomi dunia dan naik turunnya harga minyak dunia mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia. Pada periode 2005-2008, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian adalah kenaikan harga minyak. Kenaikan harga minyak ini mempengaruhi banyak hal, termasuk tekanan pada defisit anggaran, alokasi anggaran, inflasi, kestabilan ekonomi makro, dan kemiskinan. Kenaikan harga minyak menjadikan harga bahan bakar minyak mengalami kenaikan sebanyak tiga kali. Harga minyak dunia mengalami kenaikan secara terus menerus sejak akhir 2004. Harga minyak pada awal tahun 2005 menjadi 63-64 USD per barrel. Dampak peningkatan harga minyak ini terlihat dalam beberapa hal, antara lain

(Abimanyu (Ed), 2010, 363-364): (1) Tekanan pada anggaran pemerintah. Dengan harga minyak sekitar 60 dollar per barrel, beban subsidi akan meningkat lebih dari Rp 120 Triliun. (2) Neraca pembayaran. Peningkatan defisit anggaran belum mencapai 1%, namun berdampak pada tekanan di neraca perdagangan minyak. Permintaan yang tinggi di satu sisi, dengan realisasi produksi yang mengalami penurunan dari 1,125 juta menjadi hanya 1,06 juta, mengakibatkan kelebihan permintaan yang cukup tajam. Situasi ini diperburuk dengan harga minyak yang meningkat tajam. Akibatnya, defisit dalam neraca perdagangan minyak meningkat. Pada semester 1 tahun 2004,

Tabel 1. Presiden, Fokus Kebijakan, Pencapaian Dominan, dan Kelemahan Pencapaian

Presiden	Fokus Kebijakan	Pencapaian yang Dominan	Kelemahan pencapaian
Soekarno	Pasca Kemerdekaan, situasi di dalam negeri kurang kondusif. Fokus kebijakan adalah perbaikan pasca penjajahan	Stabilisasi kondisi politik dan konflik dalam negeri.	Sistem kontrol perekonomian lemah sehingga inflasi tidak terkendali.
Soeharto	Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) I-VI	Pembangunan perekonomian yang berkelanjutan dan terarah.	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi masalah yang utama dalam masa Orde Baru
B.J. Habibie	Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I Memperkuat pemulihan ekonomi pasca Krisis Moneter dengan memulihkan kegiatan investasi, perdagangan, pemulihan kinerja sektor perbankan dan dunia usaha	Pembangunan Jangka Panjang UU Anti monopoli dan UU Otonomi daerah.	Daya beli masyarakat menurun tajam dan tingginya resiko usaha didalam negeri sehingga pemulihan kepercayaan terhadap perekonomian berjalan lambat
Abdurrahman Wahid	Penguatan pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM, Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI)	Menjalin hubungan bilateral dan multilateral dengan beberapa negara lain	Proses pemulihan ekonomi relatif lambat, besarnya beban pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga utang dan subsidi.
Megawati Soekarno Putri	Pengelolaan Hutang Luar negeri, program UKM, Privatisasi BUMN	Laju Inflasi mulai menurun, suku bunga menurun tajam, pertumbuhan ekonomi meningkat dan nilai tukar rupiah menguat.	Bom Bali, Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak
Susilo Bambang Yudhoyono	Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Subsidi BBM, Kebijakan berfokus pada sektor riil dan keuangan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas pada ekonomi makro	Ekonomi Indonesia stabil dan inflasi makin terkendali, pertumbuhan permintaan domestik dan penurunan impor	Tingkat pengangguran meningkat dan distribusi pendapatan timpang

peningkatan adalah sebesar 1.122,5 Juta USD. Pada semester 1 tahun 2005, defisit neraca perdagangan meningkat untuk minyak mentah mencapai 3.226 Juta USD. (3) Tekanan pada nilai rupiah. Permintaan Dollar yang tinggi untuk membeli minyak akan mempengaruhi nilai rupiah. Tekanan pada rupiah, akhirnya akan memberikan defisit pada anggaran dan pada akhirnya menaikkan harga BBM.

Selama Februari 2005-Maret 2006, Garis Kemiskinan naik sebesar 18,39%, yaitu dari Rp129.108,- per kapita per bulan pada Februari 2005 menjadi Rp152.847,- per kapita per bulan pada Maret 2006. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GK-BM), terlihat bahwa peran komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Februari 2005, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 70,54%, tetapi pada bulan Maret 2006, peranannya meningkat sampai 74,99%. Meningkatnya peranan GKM terhadap GK ini sebagian besar diakibatkan oleh naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok yang juga digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95% selama periode Februari 2005-Maret 2006 (Badan Pusat Statistik, 2006).

Berdasarkan pemaparan diatas, perbandingan Fokus kebijakan, pencapaian yang dominan, serta kelemahan pencapaian di tiap masa kepresidenan di Indonesia dirangkum dalam Tabel 2.

Selain analisis di atas, berikut ini juga akan diuraikan kondisi dan pencapaian masa kepresidenan dari sisi kepemimpinan, politik, dan ekonomi. *Pertama, Kepemimpinan*. Soekarno merupakan seorang pribadi

berkharisma, yang mampu mempersatukan bangsanya (Katoppo, 1981, 140). Pada masa kepemimpinan Soekarno ini, Irian Barat berhasil kembali ke pangkuan Ibu pertiwi setelah melalui diplomasi, tetapi kemudian terjebak dalam konfrontasi dengan Malaysia. Bung Karno (sapaan untuk Presiden Soekarno) adalah seorang pemimpin yang cinta kepada rakyat dan dicintai oleh rakyat. Umumnya apa yang dirasakan oleh rakyat dimengerti Bung Karno, dan apa yang dimaksudkan oleh Bung Karno dimengerti oleh rakyat (Salam. 1984, 116).

Pasca pemberontakan PKI (G 30 S/ PKI), kabinet pemerintahan Soeharto menguraikan tiga landasan dalam kabinet yang dibentuknya, yakni (a) menciptakan kondisi mental dan psikologis bagi keperluan stabilitas bidang sosial-politik dan sosial ekonomi, (b) memajukan bidang struktural (suprastuktural dan infrastruktur), sebagai prasarana stabilitas material, dan (c) memajukan bidang material yaitu fase rehabilitasi dan fase stabilitasi (Nugroho, 1984, 196-197).

Visi, misi dan kepemimpinan presiden Habibie dalam menjalankan agenda reformasi tidak bisa dilepaskan dari pengalaman hidupnya. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada faktor-faktor yang bisa diukur. Presiden B.J. Habibie menjalankan pemerintahannya tanpa adanya wakil presiden. Pola kepemimpinan Habibie seperti itu dapat dimaklumi mengingat latar belakang pendidikannya sebagai doktor di bidang konstruksi pesawat terbang sehingga lebih tertata tanpa ada campur tangan politik (http://id.wikipedia.org/wiki/Bacharuddin_Jusuf_Habibie).

Pengalaman memimpin suatu partai menjadikan Gus Dur terpilih saat Pemilu 1999 sebagai presiden Indonesia menggantikan B.J Habibie. Banyak kalangan menilai

bahwa cara Gus Dur memimpin negara tidak jauh berbeda dengan cara beliau memimpin partainya, sehingga banyak kalangan yang merasa tidak puas, berujung pada naiknya Megawati menggantikan Gus Dur sebelu masa kepemimpinannya berakhir.

Megawati berkewajiban memegang amanah melaksanakan agenda reformasi terlebih dahulu. Untuk itu, instrumen utamanya adalah penguatan identitas reformatif PDIP, kemudian mendorong proses politik dalam partainya yang juga bernuansa reformasi (Muchtar, 2002, 190-191). Pemerintahan Presidensial menjadi tumpuan Megawati dalam memperkuat kapasitas politiknya. Rangkap jabatan presiden dan ketua umum PDIP membuat jabatan presiden kuat, kecenderungan parlementarisme masih bisa diawasi atau dikendalikan melalui fraksi PDIP. (Muchtar, 2002, 160).

Sejak menjadi presiden, SBY telah menunjukkan kualitas kepemimpinan, keberanian, dan semangat untuk menjawab tantangan yang menghadang Indonesia. Pasca bencana Aceh, dia berhasil menghimbau dunia untuk bersama-sama meringankan beban korban bencana tersebut, serta memberi semangat untuk memulai lagi hidup mereka.

SBY memiliki visi jangka panjang untuk membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang kuat, bersatu, dan sejahtera. SBY merupakan seorang demokrat, seorang pemimpin yang memiliki perhatian besar pada rakyat jelata. Dia percaya akan kebaikan pasar terbuka dan arti penting pemerintahan yang baik. Dia tahu bahwa hal tersebut akan meningkatkan lingkungan bisnis serta akan mampu menarik investasi asing. Dia juga memprioritaskan revitalisasi pertanian dan perekonomian pedesaan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dia menganggap pen-

ting kedamaian dan stabilitas. Dia telah mulai meletakkan fondasi bagi stabilitas dan pembangunan di masa datang bagi Indonesia dan untuk memainkan peran sebagai pemimpin di ASEAN.

Kedua, Politik. Perpolitikan Indonesia memiliki andil yang kuat dalam tata sistem pemerintahan dan non pemerintahan. Sebelum merdeka, politik didominasi oleh bangsa asing. Sejak Indonesia merdeka, era perpolitikan mulai masuk dalam ranah pemerintahan dan non pemerintahan. Kepemimpinan Soekarno merupakan awal dari babak baru Indonesia, meskipun kondisi masih belum stabil.

Pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Soekarno diwarnai oleh faham Marhaenisme. Salah satu pemikirannya tentang ekonomi adalah adanya demokrasi terpimpin di Indonesia yang bertujuan melakukan pembangunan berencana yang harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat. Pembangunan berencana ini bertujuan untuk membentuk masyarakat sosialis Indonesia dan menghapus sisa-sisa kolonialisme dan feodalisme. Hakekat dasar ekonomi terpimpin adalah memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat agar bisa berkembang. (Rifai, 2009). Namun, Soekarno lebih berfokus pada membenahan sistem pemerintahan dan penyalarsan sistem politik, sedangkan perekonomian belum menjadi prioritas utama. Pada saat itu pertumbuhan penduduk naik, menjadi salah satu penyebab meningkatnya pengangguran dan ketidakmerataan pertumbuhan penduduk. Beberapa program pemerintah untuk meratakan penduduk sudah dilakukan.

Soeharto melakukan pembaharuan politik pasca kepemimpinan Soekarno, dengan menekankan pada ideologi Pancasila. Dalam pembangunan kehidupan po-

litik sekarang ini, ideologi negara Pancasila telah diletakkan pada proporsi yang tepat dan wajar. Pancasila sebagai satu-satunya inti bagi semua kekuatan sosial-politik yang tidak lain adalah perampungan dan pembulatan proses pembaharuan kehidupan politik yang sejak lahirnya Orde Baru telah kita putuskan, justru untuk menjamin kelanjutan dan kelancaran pembangunan bangsa. Dalam menjalankan tata-laksana pemerintahan, maka kebijaksanaan politik akan ditinjau seiring perkembangan dan perubahan situasi. Prioritas dan tekanan pembangunan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu dalam proses yang berkesinambungan yang utuh. Soeharto menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal yang harus dipegang oleh semua orang Indonesia. Pada tahun 1990-an, sekurang-kurangnya sampai ia turun dari kursi kekuasaannya tahun 1998, praktis semua orang Indonesia yang aktif berpolitik mendukung azas tersebut, walaupun pendukung dan penolakan Orde Baru menafsirkan secara berbeda sila-sila yang berkonotasi banyak (Nugroho, 1984, 224).

Peran angkatan bersenjata adalah vital bagi Orde Baru. ABRI menjaga dominasi negara atas masyarakat. ABRI membenarkan intervensi militer di bidang politik sipil menurut doktrin dwifungsi ABRI. Angkatan bersenjata melaksanakan intervensi dengan menggunakan dwifungsi yang menempatkan tenaga militer, yang aktif atau pensiunan, di MPR, DPR dan DPR tingkat provinsi, pusat serta kabupaten. ABRI juga mengawasi penduduk melalui komando teritorial yang meliputi seluruh negara dari Jakarta sampai ke pulau terpencil, termasuk setiap desa (Emmerson (Ed), 2001, 74-75).

Masa pemerintahan Habibie merupakan masa dimana kondisi kacau pasca pengunduran diri Soeharto, berujung pada

berbagai kerusuhan dan disintegrasasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Habibie membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional atau IMF (*International Monetary Fund*) dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Pada masa pemerintahan Habibie, banyak tahanan politik dibebaskan dan kontrol atas kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi dikurangi. Pada masa ini, Timor Timur lepas dari Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999 (http://id.wikipedia.org/wiki/Bacharuddin_Jusuf_Habibie).

Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang beranggotakan berbagai partai politik PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Gus Dur kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup (http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid).

Gerakan reformasi masih terjadi saat Presiden Megawati memimpin Indonesia. Presiden yang dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999 mempunyai amanah untuk melaksanakan reformasi politik. Transisi politik dalam setiap kepemimpinan sering dipenuhi dengan kontradiksi dan tindakan politik yang berlawanan arah. Presiden Megawati berkewajiban memegang teguh amanah untuk melaksanakan agenda reformasi tersebut dengan instrumen utamanya melalui identitas reformatif PDI-

P. Berbagai kekuatan politik dengan beragam orientasi terlibat dalam perjalanan reformasi (Muchtari, 2002, 190-191).

Intisari dari pemikiran politik SBY adalah sebagai berikut. Dia menganggap bahwa demokrasi adalah sebuah sistem dan model pemerintahan yang paling ideal dan cocok bagi bangsa Indonesia. Dia juga berpendapat bahwa tata kelola pemerintahan dianggap sebagai suatu pemerintahan yang bersih dan kompeten, merupakan solusi bagi segala permasalahan negara dan dunia. Yang tidak kalah penting menurutnya adalah bahwa demokrasi dan tata kelola pemerintahan juga memiliki hubungan sebagai unsur-unsur pembentuk negara yang kuat (lihat Kurlinawati, 2009).

Ketiga, Ekonomi. Dalam masa Soekarno, pembangunan wilayah kota menjadi titik utama pembangunan. Gedung-gedung yang dibuat masa pemerintahan Soekarno bertujuan agar ibukota semakin cantik dan malam harinya menjadi megah. Beberapa gedung yang dibuat masa Presiden Soekarno merupakan gedung-gedung yang berupa hotel (Hotel Indonesia dan Hotel Borobudur), kantor-kantor kenegaraan (Gedung MPR dan DPR), pusat perbelanjaan (Sarinah), tempat ibadah (Mesjid Istiqlal), monumen, Gedung olah raga (Kompleks Gelora Bung Karno) dan jembatan semanggi (*Cloverleaf-bridge*). Berbagai bangunan besar yang dibuat merupakan bentuk awal dari Ibukota, yaitu Jakarta (Salam, 1984, 151).

Pemerintahan Soeharto dimulai dengan penetapan sebuah rencana pembangunan nasional jangka panjang. Pembangunan nasional yang meliputi segala bidang ini bertujuan mengejar keterlambatan modernisasi bangsa, untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin, sesuai dengan Pancasila. (Nugroho,

1984, 260). Salah satu imbas dari upaya modernisasi tersebut adalah peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) terjadi di tahun 1974 yang bermula saat kedatangan Perdana Menteri Jepang hingga berujung dengan kerusuhan, penjarahan dan pembakaran di sebagian besar lokasi di Jakarta. Aksi ini disebabkan oleh demonstrasi anti modal asing yang mengakibatkan mobil-mobil buatan Jepang dirusak dan dibakar (Odang, 1981, 31).

Pada zaman Orde Baru, banyak berdiri organisasi pengusaha, dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi anggota dan *bargaining power*-nya. Menjelang kejatuhan Orde Baru Soeharto, tepatnya pada Maret 1998 hutang luar negeri Indonesia adalah USD 137,424 milyar, jauh di atas ambang batas USD100 milyar. Dari utang itu USD 63,732 milyar adalah utang pemerintah. Jadi separuhnya atau USD 73,962 milyar merupakan utang swasta besar, dimana USD 10,5 milyar berjangka pendek. Sebagian besar utang ini berasal dari bank komersil yang mengenakan persyaratan berat: berjangka pendek dan bunga tinggi dan belum termasuk utang Grup Sinar Mas milik konglomerat Ekajipta Widjaja (Oek Ek Tjhong) sekitar USD 14 milyar yang baru terungkap akhir 1999 (Rafick, 2008, 10-11).

Memasuki masa pemerintahan Habibie, Indonesia berhasil menurunkan kurs menjadi sekitar Rp10.000/USD dan Rp15.000/USD. Pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah naik ke level USD6500/USD, merupakan kurs yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar BI bisa berfokus pada pengurusan bidang ekonomi. Habibie juga meng-

angkat pengusaha menjadi utusan khusus dan menggunakan dana pribadi dari pengusaha selama dalam tugas. Tugas tersebut sangat penting, karena salah satu kelemahan pemerintah adalah kurang menjelaskan keadaan Indonesia yang sesungguhnya pada masyarakat internasional (http://id.wikipedia.org/wiki/Bacharuddin_Jusuf_Habibie).

Selain itu, Habibie juga memiliki konsep industri padat karya melalui konsep Penerapan produk prioritas yang diterapkan dengan teknologi canggih sebagai nilai tambah dalam produksi. Konsep ini mengandalkan pada keuntungan komparatif dengan orientasi pasar bebas dan ekspor produk-produk padat karya dan sumber daya alam (Gie, 1994, 17).

Bidang ekonomi masa pemerintahan Gus Dur diisi dengan kunjungan ke negara-negara ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania untuk menjalin kerjasama dengan dunia internasional. Salah satu upaya besar Gus Dur yang signifikan adalah membuat etnis China merasa lebih nyaman tinggal di Indonesia, sehingga mereka tidak membawa modal yang mereka miliki ke luar negeri.

Kebijakan ekonomi masa pemerintahan Megawati adalah Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, Program pengelolaan hutang luar negeri, investasi asing, Usaha Kecil Menengah dan restrukturisasi dalam bidang keuangan. Program privatisasi tersebut bertujuan mengembangkan potensi keuntungan usaha yang telah dirintis oleh BUMN. Selain itu, privatisasi memungkinkan pemerintah memiliki beberapa opsi eksplorasi sumber-sumber langka untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Mughtar dkk, 2002, 118-119).

Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Tetapi tingkat tersebut belum setinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di masa Soeharto selama 32 tahun, yakni sekitar 7%. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. (<http://www.setneg.go.id>).

Penutup

Setiap pemimpin dalam suatu negara memiliki ciri khas kepemimpinan yang akan mempengaruhi semua sektor yang terdapat di bawahnya. Pertumbuhan ekonomi pada awal kemerdekaan tidak berjalan dengan baik. Ketika pembenahan di sektor ekonomi semakin dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto, perekonomian meningkat dengan pesat. Selama pemerintahan Soeharto peningkatan terjadi dalam sektor pembangunan fisik. Pemerintahan selama 32 tahun ini menjadi semakin rapuh ketika dalam pemerintahan Soeharto terdapat KKN, diperparah oleh krisis moneter pada 1997-1998 hingga pertumbuhan ekonomi adalah minus 13,12% di tahun 1998. Sejak peristiwa tersebut, kondisi perekonomian Indonesia mengalami perbaikan dan kembali meningkat di masa pemerintahan megawati hingga masuk pada pemerintahan SBY.

Peranan presiden di sebuah negara menjadi penting karena presiden adalah pemimpin di dalam negeri dan menjadi wakil bangsa saat kunjungan ke luar negeri. Oleh karena itu, Presiden haruslah memiliki kecerdasan, sifat kepemimpinan yang mampu mengayomi rakyatnya, peka terhadap

masalah-masalah baik masalah dalam negeri maupun masalah global dan mampu bertindak untuk menanggulangi dampak yang akan masuk serta antisipasi terhadap apapun yang dapat mengancam rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. (Ed). 2010. *“Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi”*. Kompas: Jakarta.
- Arifin, A. 2010. “2 Presiden Indonesia yang Belum Anda Ketahui”. *Kumpulan Arikel Aneh/Unik/Gokil/Ekstrim*. Tersedia di <http://timetotalks.blogspot.com/2010/02/2-presiden-indonesia-yang-belum-anda.html>.
- Arndt, H.W. 1991. *Pembangunan ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*. Editor dan pengantar Murbyarto. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Bank Indonesia. 1999. Laporan Tahunan, Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2000. Laporan Tahunan, Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2001. Laporan Tahunan, Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2001. Laporan Tahunan, Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2003. Laporan Tahunan, Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2006. *Berita Resmi Statistik, No, 47/IX/1 September 2006*.
- BPS. 1994. *Statistik 60 tahun Indonesia Merdeka*. BPS. Jakarta.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Fajar Interpratama Offset. Jakarta.
- Djalal, D.P. 2008. *Harus Bisa!: Seni Memimpin Ala SBY*. Red and White Publishing. Jakarta.
- Emmerson, D.K. 2001. *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. (Ed.) PT Gramedia Pustaka Utama
- Gie, K.K. 1994. *Analisis Ekonomi Politik*. PT Ikrar Mandiri Abadi. Jakarta.
- Gottschalk, L. 1986. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). UI Press. Jakarta.
- Idrus, M. 2007. *Metode-Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. UII Press. Yogyakarta.
- Kartodirdjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Katoppo, A. 1981. *80 Tahun Bung Karno*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Kontras, “Perbandingan perilaku Kekuasaan beberapa Presiden Paska Soeharto”. Bisa dilihat di http://www.kontras.org/data/perbandingan_perilaku_kekuasaan_beberapa_presiden_paska_Soeharto.pdf
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Budaya. Yogyakarta.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang. Yogyakarta.
- Kurlinawati, F. 2009. *Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono tentang*

- Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, Skripsi, Departemen Ilmu Politik.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara.
- Lesmana, T. 2009. *Dari Soekarno hingga SBY, Intrik dan Lobi Politik para Penguasa.* Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Lindblad, T.J. 2002. "The Late Colonial State and Economic Expansion, 1900-1930" dalam Dick, H., V.J.H. Houben, J.T. Lindblad, and T.K. Wie (Ed.), *The Emergence of A National Economic, An Economic History of Indonesia 1800-2000*, Honolulu, Allen & Unwin, University of Hawaii Press.
- Majalah Kereta Api. Edisi 49. Agustus 2010
- Moleong, L. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, R. 2002 *Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia.* Depok. PT Rumpun Dian Nugraha.
- Nugroho, T. 1984. *Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia.* Semarang. Effhar offset.
- Odang, I. 1996. *Dinamika Orde Baru Dalam Pembangunan Jangka Panjang II.* Yayasan Bina Taruna. Jakarta.
- Pamungkas, S.B. 2001. *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total.* Erlangga. Jakarta.
- Pratiwi, P.M. 2011. "Sejarah Ekonomi Indonesia sejak Orde Lama Hingga Era Reformasi". tersedia di <http://putrimarchela.blogspot.com/2011/03/sejarah-ekonomi-indonesia-sejak-orde.html> (diunduh 20 April 2012).
- Rafick, I. 2008. *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Sebuah Investigasi 1997-2007. Mafia Ekonomi dan Jalan Baru Membangun Indonesia.* Ufu. Jakarta.
- Rickles, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008.* Serambi Ilmu Semesta. Jakarta.
- Rickles, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern.* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Rifai, A..2009. *Pemikiran Sukarno Tentang Marhaenisme*[universitas?]
- Salam, S. 1984. *Bung Karno Putra Fajar.* Gunung Agung. Jakarta.
- Setiawan, B dan B. Nainggolan.2004. *Partai Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009 (Indonesian Political Parties: Ideologies and Programs 2004-2009.* Eds. Penerbit Kompas
- Sjahrir. 1991. *Analisis dan Metodologi Ekonomi Indonesia.* Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Soebagyo, I.N. 1980. *Jusuf Wibisono Karang di Tengah Gelombang.* Gunung Agung. Jakarta.
- Suprpto, B. 1985. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia.* Ghalia Indonesia. Malang.
- Tjiptohrijanto, P. 1997. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi.* Rineka Cipta. Jakarta.
- Tong, G.C. 2005. *S.B. Yudhoyono, Indonesia, The Challenge of Change.* ISEAS Publication. Institute of Southeast Asian Studies. Pasir Panjang. Singapore.

Zaini, A. W.S. 2011. *Pembangunan Indonesia dari Masa Pemerintahan Soekarno sampai ke Pemerintahan SBY*. tersedia di <http://afrizalws.zaini.wordpress.com/artikel/pembangunan-indonesia-dari-masa-pemerintahan-soekarno-sampai-ke-pemerintahan-sby/>